

MAKALAH
STUDI SOSIAL MASALAH GEOSFER, EKOBIS, SEJARAH, DAN WAKTU,
POLITIK, HUKUM, DAN KEWARGANEGARAAN,
MASALAH PENDIDIKAN DAN SOSIAL

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Konsep Dasar IPS

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati,M.Pd.
2. Dr. Irma Lusi Nugraheni, M.Si.
3. Dr. Nikki Tri Sakung, M.Pd.



Disusun Oleh:

1. Resti Apriliyani 2523031007
2. Ahmad Ridwan Syuhada 2523031008
3. Maria Ufa Rara Ardhika 2523031009

MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan lancar. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengembangan Konsep Dasar IPS

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Juga untuk Ibu Dr. Pujiati,M.Pd., Ibu Dr. Irma Lusi Nugraheni, M.Si., dan Ibu Dr. Nikki Tri Sakung, M.Pd. selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan program studi yang penulis tekuni. Penulis menyadari, makalah yang penulis tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	33
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Studi Sosial Masalah Geosfer.....	4
2.2 Studi Sosial Masalah Ekobis	6
2.2.1 Pengertian Ekobis dalam Konteks Sosial	6
2.2.2 Peran Ekobis dalam Pembentukan Kesejahteraan Sosial	7
2.2.3 Peran Ekobis dalam Pembentukan Keadilan Sosial	8
2.2.4 Studi Sosial Ekobis di Indonesia	9
2.3 Studi Sosial Masalah Sejarah dan Waktu	10
2.3.1 Sejarah sebagai Cermin Sosial.....	10
2.3.2 Kesadaran Sejarah dan Identitas Nasional.....	11
2.3.3 Pemanfaatan Perspektif Waktu dalam IPS	12
2.4 Studi Sosial Masalah Politik, Hukum dan Kewarganegaraan	13
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Politik serta Hukum dalam Kehidupan Sosial ..	14
2.4.2 Krisis Partisipasi dan Rendahnya Literasi Politik Warga Negara	15
2.4.3 Masalah Penegakan Hukum dan Korupsi.....	16
2.4.4 Kewarganegaraan Kritis dalam IPS	17
2.5 Studi Sosial Masalah Pendidikan dan Sosial.....	19
STUDI KASUS	22
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang kajian yang bersifat multidimensional dan interdisipliner, mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti geografi, ekonomi, sejarah, politik, hukum, serta pendidikan dan sosial. Studi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pengembangan kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut National Council for the Social Studies (NCSS, 2010), studi sosial bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang beralasan, cerdas, dan beretika sebagai warga negara dari masyarakat yang demokratis dan saling bergantung di dunia yang beragam.

Dalam konteks geosfer, studi sosial menelaah interaksi antara manusia dan lingkungannya yang mencakup aspek litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Permasalahan seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam menjadi isu global yang menuntut kesadaran ekologis masyarakat. Melalui kajian IPS, peserta didik diharapkan memahami keterkaitan antara perilaku manusia dan keseimbangan lingkungan, serta mampu berpikir kritis untuk mencari solusi berkelanjutan terhadap masalah geosfer tersebut (Suharjo, 2019). Dari sisi ekonomi dan bisnis (*ekobis*), studi sosial berperan dalam menumbuhkan literasi ekonomi dan kewirausahaan sosial. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi sumber daya menjadi tantangan serius dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pembelajaran IPS perlu menanamkan nilai kemandirian ekonomi, etika bisnis, dan kepedulian terhadap keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan ekonomi (Saptasari, 2022).

Kajian sejarah dan waktu juga menjadi dimensi penting dalam studi sosial. Melalui pemahaman sejarah, peserta didik belajar mengenal identitas bangsa, nilai perjuangan, dan perubahan sosial dari masa ke masa. Menurut Kuntowijoyo (2013), sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk memahami arah masa depan bangsa. Dengan demikian, pembelajaran sejarah dalam IPS menumbuhkan kesadaran temporal dan kebangsaan yang kuat

pada peserta didik. Sementara itu, aspek politik, hukum, dan kewarganegaraan berperan dalam menumbuhkan kesadaran demokratis dan tanggung jawab sosial warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam IPS mendorong peserta didik memahami hak, kewajiban, serta peran aktif mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Banks (2008), pendidikan kewarganegaraan yang kritis perlu mendorong individu untuk menganalisis ketidakadilan sosial, berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

Selain itu, masalah pendidikan dan sosial menjadi tantangan fundamental dalam pembangunan manusia. Ketimpangan pendidikan, rendahnya literasi, kemiskinan, dan disorganisasi sosial merupakan fenomena yang perlu dipahami secara ilmiah melalui pendekatan studi sosial. Tilaar (2012) menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan berdaya. Oleh karena itu, studi sosial perlu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran kritis, empati sosial, serta kemampuan memecahkan masalah sosial secara reflektif dan kolaboratif.

Dengan demikian, studi sosial mencakup pemahaman yang luas terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia mulai dari geosfer dan ekonomi hingga politik, hukum, dan sosial. Melalui integrasi antar bidang tersebut, peserta didik diharapkan mampu berpikir holistik, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara global. Kajian mengenai masalah geosfer, ekobis, sejarah, politik, hukum, serta pendidikan dan sosial dalam studi sosial menjadi sangat penting untuk membekali generasi muda dalam menghadapi kompleksitas tantangan dunia modern yang dinamis dan saling terhubung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterkaitan antara manusia dan lingkungan dalam konteks masalah geosfer?
2. Bagaimana peran ekonomi dan bisnis (ekobis) dalam pembentukan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat?
3. Bagaimana nilai sejarah dan dimensi waktu berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran kebangsaan?

4. Bagaimana hubungan antara aspek politik, hukum, dan kewarganegaraan dalam menciptakan kehidupan demokratis yang berkeadilan?
5. Bagaimana studi sosial dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah pendidikan dan sosial yang terjadi di masyarakat?

1.3 Tujuan

1. Untuk memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dalam konteks permasalahan geosfer.
2. Untuk menganalisis peran ekonomi dan bisnis (ekobis) dalam membangun kesejahteraan serta pemerataan sosial di masyarakat.
3. Untuk mengkaji peranan nilai sejarah dan kesadaran waktu dalam pembentukan identitas dan karakter kebangsaan.
4. Untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek politik, hukum, dan kewarganegaraan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan beretika.
5. Untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah pendidikan dan sosial melalui perspektif studi sosial yang kritis dan kontekstual.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Studi Sosial Masalah Geosfer

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya memiliki hubungan saling timbal balik yang kompleks dan dinamis. Dalam kajian geografi hubungan ini dikenal dalam konteks geosfer. Geosfer dalam IPS adalah studi mengenai lapisan-lapisan bumi (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer) beserta fenomena alam yang terjadi di dalamnya dan bagaimana fenomena tersebut berinteraksi dengan aktivitas manusia. Dalam pelajaran IPS, geosfer menjadi objek kajian yang penting untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungannya.

Menurut Bintarto (1997) Geosfer adalah lapisan kehidupan di permukaan bumi yang terdiri dari unsur-unsur fisik dan sosial yang saling berinteraksi dan membentuk kesatuan ruang kehidupan manusia. Yang berarti geosfer tidak hanya mencakup unsur alam saja tetapi juga unsur kehidupan manusia dan segala aktifitasnya. James E. Burt Peter L. Muller (1993) Geosfer adalah sistem yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu: litosfer (lapisan batuan dan tanah), hidrosfer (Perairan), atmosfer (lapisan udara), biosfer (mahluk hidup termasuk manusia) keempat komponen ini saling berhubungan dan membentuk keseimbangan ekosistem di bumi.

Geosfer dalam pelajaran IPS digunakan untuk mempelajari bagaimana aktivitas manusia seperti pertanian atau pembangunan memengaruhi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Bagaimana gempa bumi atau perubahan iklim (fenomena atmosfer dan litosfer) memengaruhi kehidupan manusia. Atau bagaimana interaksi antar manusia, air, daratan dan udara menciptakan fenomena seperti banjir atau kekeringan.

Dalam konteks ilmu sosial, hubungan manusia dengan geosfer dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama: adaptasi, interaksi, dan modifikasi lingkungan. 1) Adaptasi terhadap lingkungan, manusia berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi geosfer di sekitarnya. Misalnya, masyarakat di daerah pegunungan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi tanah dan suhu yang sejuk, sedangkan masyarakat pesisir menyesuaikan kehidupan dengan potensi laut. Adaptasi ini mencerminkan bagaimana manusia bergantung pada karakteristik fisik bumi. 2) Interaksi manusia

dengan lingkungan, manusia memanfaatkan unsur-unsur geosfer seperti tanah, air, dan udara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk pertanian, pemukiman, transportasi, maupun industri. Namun, interaksi ini juga bisa menimbulkan masalah, seperti banjir, longsor, atau kekeringan, ketika pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara berkelanjutan. 3) Modifikasi lingkungan oleh manusia, manusia sering mengubah bentuk dan fungsi lingkungan geosfer untuk kepentingannya, misalnya melalui pembangunan jalan, reklamasi pantai, atau eksploitasi tambang. Aktivitas ini dapat menimbulkan masalah geosfer, seperti kerusakan tanah, pencemaran air, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Seperti kasus banjir di Jakarta, Banjir yang sering melanda DKI Jakarta merupakan contoh nyata ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan geosfer. Faktor alamiah seperti curah hujan tinggi dan posisi Jakarta yang berada di dataran rendah menyebabkan potensi genangan air. Namun, faktor manusia memperburuk kondisi ini, misalnya: Alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman dan pusat bisnis menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, pembuangan sampah ke sungai menghambat aliran air, urbanisasi yang tidak terkendali meningkatkan kebutuhan lahan dan mempersempit ruang terbuka hijau. Akibatnya, siklus hidrologi terganggu, sistem drainase tidak mampu menampung debit air hujan, dan timbul masalah geosfer berupa banjir tahunan yang berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Dampak timbal balik (*feedback loop*) lingkungan yang rusak akibat ulah manusia akan memberikan dampak negatif kepada manusia sendiri. Contohnya, deforestasi menyebabkan erosi dan banjir, yang kemudian mengancam permukiman dan pertanian. Dengan demikian, hubungan manusia dan lingkungan bersifat saling bergantung dan berbalas pengaruh. Dalam IPS, keterkaitan ini dipelajari untuk membentuk kesadaran bahwa masalah geosfer bukan hanya masalah alam, tetapi juga sosial. Pengelolaan lingkungan yang baik memerlukan sikap tanggung jawab, kearifan lokal, dan kebijakan sosial yang berpihak pada kelestarian alam.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan manusia dan lingkungan dalam konteks geosfer bersifat dinamis, timbal balik, dan kompleks. Manusia dapat menjadi penyebab sekaligus korban dari perubahan geosfer. Oleh karena itu,

pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

2.2 Studi Sosial Masalah Ekobis

2.2.1 Pengertian Ekonomi dan Bisnis dalam Konteks Sosial

Secara etimologis, kata *ekonomi* berasal dari bahasa Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan), yang berarti pengaturan rumah tangga. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (2010), ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.

Sementara itu, bisnis menurut Griffin dan Ebert (2014) adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen dan lingkungan sosial. Dalam konteks sosial, ekonomi dan bisnis tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profit, tetapi juga pada pemerataan hasil dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *triple bottom line* dari John Elkington (1998) yang menekankan bahwa keberhasilan bisnis harus dilihat dari tiga aspek: *profit* (keuntungan), *people* (manusia), dan *planet* (lingkungan).

Dalam pembelajaran IPS, bidang ekonomi dan bisnis (ekobis) menjadi salah satu kajian penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Menurut Susanto (2014), IPS bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, kajian ekonomi tidak hanya untuk memahami mekanisme pasar, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab ekonomi terhadap kesejahteraan bersama.

Menurut Mulyasa (2015), pembelajaran IPS harus mampu mengaitkan konsep-konsep ekonomi dengan realitas sosial sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menyadari dampak sosial dari setiap aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat.

2.2.2 Peran Ekobis dalam Pembentukan Kesejahteraan Sosial

Melalui pembelajaran IPS berbasis ekonomi, siswa belajar bagaimana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dan mereka memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak. Menurut Amartya Sen (1999), kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari *capabilities* kemampuan seseorang untuk hidup secara bermartabat dan produktif.

Ekobis berperan menciptakan kesejahteraan melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Penciptaan Lapangan Kerja

Kegiatan bisnis menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, sektor UMKM di Indonesia menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Kemenkop UKM, 2023). Selain itu kegiatan bisnis meningkatkan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor (industri, perdagangan, jasa), sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Peningkatan Produksi dan Pendapatan Nasional

Semakin banyak kegiatan ekonomi dan bisnis yang produktif, semakin besar PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan. Peningkatan PDB akan mendorong kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi.

3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ekobis yang berkelanjutan mengubah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tanpa merusak lingkungan, yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan negara jika dikelola secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Bisnis yang inovatif mampu menyediakan produk dan layanan yang mempermudah kehidupan masyarakat (misalnya teknologi finansial, layanan kesehatan digital, dan pendidikan daring).

Menurut Todaro & Smith (2015), kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari pemerataan kesempatan ekonomi dan keadilan sosial. IPS berperan penting dalam menanamkan pemahaman ini sejak dini.

2.2.3 Peran Ekobis dalam Pembentukan Keadilan Sosial

Dalam pembelajaran IPS, siswa diajak menganalisis ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kesenjangan antarwilayah. Melalui pendekatan ini, guru dapat membimbing siswa memahami bahwa keadilan sosial adalah hasil dari sistem ekonomi yang berkeadilan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan tanpa diskriminasi dan eksplorasi.

Menurut Soerjono Soekanto (2012), keadilan sosial terwujud apabila setiap anggota masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi. Pembelajaran IPS menginternalisasi nilai tersebut melalui diskusi, studi kasus, dan proyek sosial ekonomi. Peran ekobis dalam menciptakan keadilan sosial antara lain:

1. Distribusi Kekayaan yang Merata

Sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat (misalnya ekonomi kerakyatan, koperasi, dan UMKM) membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR)

CSR menjadi wujud nyata kontribusi bisnis terhadap masyarakat. Menurut Carroll (1999), tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari empat dimensi: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Banyak perusahaan menjalankan program CSR untuk membantu masyarakat sekitar, seperti beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, atau pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Melalui program pemerintah atau sektor swasta, masyarakat kecil dapat memperoleh akses permodalan, pelatihan, dan pasar. Hal ini membantu menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Bisnis yang melibatkan masyarakat lokal dalam rantai produksi (misalnya melalui kemitraan UMKM) dapat memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

4. Peran Negara dalam Pengaturan Ekonomi

Negara berperan memastikan agar kegiatan ekonomi dan bisnis berjalan adil melalui regulasi, pajak progresif, dan subsidi bagi masyarakat miskin. Melalui kebijakan inklusi keuangan, pemerintah dan sektor swasta membuka akses bagi masyarakat kecil agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal.

2.2.4 Studi Sosial Ekobis di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Peran besar ini menjadikan sektor UMKM sebagai bentuk nyata penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat banyak, bukan hanya segelintir pemilik modal besar.

Contoh UMKM di Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul (DIY) Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat meneliti bagaimana masyarakat lokal mengelola potensi ekonomi desa melalui pariwisata berbasis komunitas. Hasilnya, terjadi peningkatan kesejahteraan tanpa mengabaikan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Proyek seperti ini bisa dijadikan contoh dalam pembelajaran IPS untuk menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang adil dan partisipatif dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengimplementasiannya dalam pembelajaran IPS, guru IPS dapat perperan dalam, mengintegrasikan konsep ekonomi dengan nilai sosial dan moral, menyajikan studi kasus nyata di Indonesia agar siswa berpikir kritis dan

kontekstual, dan mendorong siswa menjadi warga negara yang produktif, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan sosial. Menurut Trianto (2012), pembelajaran IPS harus berorientasi pada pembentukan karakter sosial-ekonomi, yaitu kemampuan berpikir rasional dalam mengambil keputusan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan kepedulian sosial.

Peran ekonomi dan bisnis dalam pembelajaran IPS bukan hanya untuk memahami mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai alat pendidikan nilai agar siswa: memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran terhadap keadilan sosial dalam praktik ekonomi, menumbuhkan semangat kewirausahaan yang beretika dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pembelajaran IPS berperan strategis dalam membangun generasi yang cerdas secara ekonomi dan berkarakter sosial, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3 Studi Sosial Masalah Sejarah dan Waktu

2.3.1 Sejarah sebagai Cermin Sosial

Dalam konteks pengembangan konsep dasar IPS, sejarah dipandang sebagai hasil interaksi antara individu, kelompok, dan struktur sosial yang kompleks. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang disusun melalui pendekatan pendidikan untuk tujuan pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Hati, 2019). Pembelajaran sejarah dalam IPS tidak sekadar menyajikan deretan peristiwa masa lalu, melainkan memberikan perspektif historis yang membantu siswa memahami identitas mereka sebagai individu dan anggota masyarakat, sekaligus mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan sosial kontemporer yang memiliki akar historis.

Analisis historis dalam IPS membantu memahami perubahan masyarakat dari perspektif ekonomi, politik, dan budaya secara mendalam, terutama dalam mengkaji permasalahan sosial seperti kesenjangan, konflik, dan ketidakadilan. Sejarah memiliki fungsi edukatif yang mengandung unsur pendidikan, dimana orang dapat belajar dari masa lalu dengan mengambil hikmah dari berbagai

peristiwa yang terjadi, termasuk permasalahan sosial yang berulang dalam pola yang serupa di konteks berbeda (Sapriya, 2017). Hal ini berkaitan dengan dimensi sosial dan temporal dalam struktur IPS yang memadukan konsep perubahan (*change*), keberlanjutan (*continuity*), dan hubungan sebab akibat (*causality*), yang sangat relevan dalam memahami akar permasalahan sosial kontemporer seperti kemiskinan struktural, diskriminasi sosial, dan kesenjangan pendidikan yang dapat ditelusuri melalui analisis historis.

Konsep berpikir sejarah secara kronologis menekankan pentingnya urutan waktu dalam memahami peristiwa sejarah, sehingga dapat dipahami bagaimana suatu peristiwa berkembang dari awal hingga akhir dengan melibatkan unsur waktu yang mencakup perkembangan, pengulangan, kesinambungan, dan perubahan (Nasution & Lubis, 2018). Melalui pendekatan ini, sejarah menjadi cermin yang memantulkan realitas sosial, memungkinkan masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai luhur, mengidentifikasi pola-pola permasalahan sosial yang berulang seperti eksplorasi ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, dan ketimpangan kekuasaan, serta merencanakan solusi masa depan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman mengatasi permasalahan sosial di masa lalu. Pembelajaran sejarah yang mengkaji permasalahan sosial secara kritis membantu siswa memahami bahwa masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial, kebijakan politik, dan sistem ekonomi yang terbentuk secara historis.

2.3.2 Kesadaran Sejarah dan Identitas Nasional

IPS berperan penting dalam membangun kesadaran sejarah untuk memperkuat jati diri nasional dan nilai kebangsaan, sekaligus mengembangkan pemahaman kritis terhadap permasalahan sosial yang berakar dari sejarah bangsa. Pembelajaran sejarah memiliki peran vital dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa karena melalui pemahaman sejarah, generasi muda dapat mengenali akar budaya, nilai-nilai, serta perjuangan yang membentuk jati diri bangsa, termasuk memahami permasalahan sosial seperti diskriminasi, kesenjangan, dan konflik yang menjadi warisan masa lalu (Aliyah et al., 2025). Kesadaran sejarah bukan sekadar pengetahuan tentang peristiwa masa lalu,

melainkan kemampuan untuk merekonstruksi dan mengoneksikan situasi peristiwa masa lalu ke dalam konteks sosial kekinian sehingga terbangun proyeksi masa depan yang gemilang dan terhindar dari pengulangan kesalahan sosial yang pernah terjadi.

Kesadaran sejarah mendorong penghargaan terhadap keberagaman pengalaman masa lalu bangsa dan pemahaman terhadap akar permasalahan sosial dalam masyarakat majemuk. Dalam masyarakat majemuk, sejarah sering menjadi sumber identitas bagi kelompok-kelompok tertentu, dan ketika individu menyadari kontribusi serta pengalaman kelompok lain dalam sejarah, termasuk penderitaan akibat diskriminasi dan marginalisasi, hal ini dapat mengurangi prasangka, stereotip, dan meningkatkan toleransi serta empati sosial (Purwata, 2025). Pembelajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai heroik, keteladanan, patriotisme, dan nasionalisme menjadi dasar pembentukan karakter dan kepribadian siswa, sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial yang pernah dan masih terjadi dalam masyarakat. Kesadaran sejarah ini menjadi dasar pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial warga negara yang sensitif terhadap permasalahan sosial di lingkungannya. Melalui pembelajaran materi sejarah, siswa dapat memahami asal-usul, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang membentuk identitas mereka, sekaligus mengenali akar sejarah bangsa Indonesia dan permasalahan sosial yang diwariskan dari masa ke masa seperti feudalisme, patriarki, dan kesenjangan kelas (Endayani, 2018). Dengan demikian, kesadaran sejarah memperkuat fondasi masyarakat yang inklusif dan toleran, dimana perbedaan dipahami sebagai kekuatan daripada sumber konflik, serta memotivasi masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara dengan memecahkan permasalahan sosial secara konstruktif. Siswa yang memiliki kesadaran sejarah yang baik akan lebih peka terhadap isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, dan eksploitasi lingkungan, karena mereka memahami bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut terbentuk dan berkembang dalam konteks historis.

2.3.3 Pemanfaatan Perspektif Waktu dalam IPS

Perspektif waktu dalam IPS menekankan kronologi, kontinuitas, dan perubahan sosial sebagai elemen fundamental dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat dan evolusi permasalahan sosial dari masa ke masa. Konsep waktu atau dimensi temporal menentukan kapan peristiwa-peristiwa terjadi dalam proses perjalanan sejarah, yang dapat bersifat absolut (waktu yang dapat diukur secara pasti) maupun relatif (era atau periode tertentu), dengan fungsi menunjukkan urutan kronologis dan hubungan sebab-akibat antar peristiwa sejarah termasuk munculnya berbagai permasalahan sosial (Tirto.id, 2021). Kronologi sebagai ilmu bantu sejarah berfungsi untuk menyederhanakan peristiwa berdasarkan waktu kejadian dan menghindarkan anakronisme yaitu kerancuan waktu dalam sejarah, sekaligus membantu siswa memahami bahwa permasalahan sosial kontemporer seperti kemiskinan perkotaan, urbanisasi, dan pengangguran memiliki akar historis yang dapat ditelusuri melalui analisis temporal.

Sejalan dengan pendekatan sains-teknologi-masyarakat (STM), peserta didik dapat menelusuri perkembangan teknologi dan ekonomi dalam alur waktu untuk memahami dampaknya terhadap kehidupan sosial dan munculnya permasalahan sosial baru. Konsep waktu dalam memahami sejarah mencakup empat aspek penting: perkembangan (waktu yang terus berjalan mendorong manusia berkembang), pengulangan (sejarah dapat berulang dengan pola serupa di waktu berbeda termasuk permasalahan sosial yang kembali muncul), kesinambungan (masyarakat mengadopsi cara lama dari masa sebelumnya termasuk sistem sosial yang bermasalah), dan perubahan (transformasi besar dalam waktu singkat yang dapat menciptakan atau menyelesaikan permasalahan sosial) (Pijar Belajar, 2024). Pemahaman perspektif waktu ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran sejarah, tetapi juga dapat diterapkan dalam menganalisis perkembangan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya, seperti bagaimana Revolusi Industri menciptakan permasalahan sosial baru berupa eksploitasi buruh, urbanisasi masif, dan degradasi lingkungan yang dampaknya masih dirasakan hingga kini.

Hal ini melatih keterampilan berpikir historis dan kritis dalam menganalisis data sosial serta mengidentifikasi pola permasalahan sosial yang berulang dalam konteks berbeda. Berpikir kronologis membantu menghindarkan kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah, membandingkan kejadian sejarah dan permasalahan sosial di tempat lain dalam waktu yang sama, serta merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu secara tepat untuk memahami akar permasalahan sosial kontemporer (Ismaun, 2020). Dengan demikian, pemanfaatan perspektif waktu dalam IPS memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu membentuk kondisi masa kini dan memproyeksikan kemungkinan masa depan, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik dalam memahami dinamika perubahan sosial dan memecahkan permasalahan sosial. Misalnya, dengan memahami bagaimana kebijakan kolonial menciptakan kesenjangan ekonomi struktural di masa lalu, siswa dapat menganalisis mengapa kesenjangan tersebut masih bertahan hingga kini dan merancang solusi yang tepat berdasarkan pembelajaran historis.

2.4 Studi Sosial Masalah Politik, Hukum dan Kewarganegaraan

2.4.1 Pengertian dan Fungsi Politik serta Hukum dalam Kehidupan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yang mencakup sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial (Sapriya, 2009). Dalam konteks IPS, politik dan hukum dipelajari sebagai sistem pengatur hubungan sosial dan alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Politik dalam IPS mencakup konsep-konsep dasar seperti negara, kekuasaan, sistem politik, pemerintah, rakyat, hukum, UUD, keadilan, dan proses peradilan yang menjadi bagian integral dari kajian ilmu pengetahuan sosial di berbagai jenjang pendidikan.

Disiplin ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS di Indonesia meliputi ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum, dan pendidikan kewarganegaraan (Hati, 2019). Kedua aspek politik dan hukum ini menunjukkan dimensi kekuasaan (power) dan norma sosial (social order)

dalam struktur IPS yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena tiap-tiap segi kehidupan manusia diatur oleh sesuatu yang dinamakan hukum, sejalan dengan konsep Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial atau "*Zoon Politicon*" yang memerlukan regulasi dalam interaksi sosialnya.

Pembahasan mengenai politik dan hukum dalam IPS terkait erat dengan materi awal tentang dimensi dan struktur IPS yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan dan disederhanakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran, dengan mengintegrasikan berbagai unsur dari disiplin ilmu sosial sehingga menjadi bahan yang mudah dicerna oleh peserta didik (Wesley dalam Hati, 2019). Melalui pemahaman politik dan hukum dalam kajian IPS, peserta didik diharapkan dapat memahami dinamika kekuasaan dan sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.4.2 Krisis Partisipasi dan Rendahnya Literasi Politik Warga Negara

Literasi politik merupakan serangkaian pengetahuan dan kesadaran mengenai isu-isu politik, proses politik, hingga hak dan wewenang sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam politik di masyarakat maupun pemerintahan, termasuk pemahaman akan posisi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Rendahnya literasi politik warga negara Indonesia menunjukkan lemahnya kesadaran warga negara dalam menghadapi dinamika global. Partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam ranah politik.

Dihubungkan dengan tema IPS dalam konteks masyarakat global dan multikultural, krisis partisipasi dan literasi politik ini menjadi permasalahan serius yang harus diatasi melalui pendidikan. Budaya politik partisipan mendorong keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh segelintir elit, menciptakan

keseimbangan dalam sistem politik di mana masyarakat memiliki hak suara yang nyata dalam menentukan arah kebijakan negara. Kurangnya toleransi, kesadaran, dan keinginan warga negara membuat negara harus bersikeras dalam mewujudkan cita-citanya, sehingga diperlukan andil Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS untuk menyadarkan generasi muda dalam menciptakan civic engagement (Nanggala & Malihah, 2020).

IPS berperan penting dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Pendidikan IPS dirancang untuk mengembangkan kualitas warga negara secara komprehensif, tidak hanya sebagai penonton atau pemilih pasif saat pemilu, tetapi juga ikut serta dalam menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan mengambil peran aktif dalam berbagai diskusi publik. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem politik, serta merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta memastikan keputusan politik yang diambil sesuai dengan kepentingan publik.

2.4.3 Masalah Penegakan Hukum dan Korupsi

Fenomena lemahnya penegakan hukum dan korupsi merupakan masalah sosial yang menuntut pendekatan interdisipliner IPS dari berbagai aspek: hukum, politik, ekonomi, dan moral. Korupsi menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara Indonesia yang dapat merugikan perekonomian negara sekaligus merebut hak masyarakat secara luas (Pitriyah, 2022). Penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam terciptanya negara yang makmur, namun penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia belum terlaksana secara optimal dan efisien karena masih terdapat beberapa kelemahan serta permasalahan yang menjadi hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia jika ditinjau dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman belum berjalan efektif atau optimal, hal ini dilihat dari adanya peraturan perundangan dan penegak hukum yang mengatur tindak pidana korupsi belum dapat mengurangi kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut justru tersangkanya merupakan penegak hukum itu sendiri yang dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dan rasa takut akan hukum dari

penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang (Karunia, 2022). Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen (Setiadi, 2018).

Dalam pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (STM), teknologi informasi berperan penting dalam transparansi hukum dan partisipasi masyarakat mengawasi kebijakan publik. Tindakan korupsi telah menjelma secara modern mengikuti perkembangan kemajuan digital secara aktif, sehingga pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh melalui jalur penal (penindakan) dan non-penal (pencegahan) yang saling melengkapi (Pratama, 2024). Kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Pembelajaran IPS perlu mengembangkan kesadaran etika sosial dan integritas sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi permasalahan korupsi di masa depan. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, untuk secara bersama-sama mengatasi masalah korupsi ini dengan meningkatkan penegakan hukum yang tegas, pemberantasan gratifikasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Pendidikan IPS menjadi wahana strategis untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.

2.4.4 Kewarganegaraan Kritis dalam IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berperan penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran sosial, moral, dan politik yang tinggi. IPS memfasilitasi *civic education* berbasis nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial sebagai komponen penting dalam pembentukan warga negara yang berkarakter dan berdaya kritis. Melalui integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam IPS, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, analitis, serta kritis terhadap berbagai fenomena sosial di sekitarnya (Rahmandani, 2019; Wahab & Sapriya, 2011). Kewarganegaraan kritis (*critical citizenship*) menekankan pentingnya peran peserta didik sebagai subjek aktif dalam

kehidupan sosial dan politik, bukan sekadar sebagai penerima nilai. Banks (2008) menjelaskan bahwa warga negara kritis adalah individu yang memahami adanya ketidakadilan sosial dan berusaha melakukan transformasi sosial melalui tindakan reflektif dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Freire (1970) yang menekankan bahwa pendidikan harus bersifat *problem-posing*, yaitu mengajak peserta didik berpikir kritis terhadap realitas sosial agar tidak terjebak dalam sistem yang menindas.

Karakteristik kewarganegaraan abad ke-21 meliputi kemampuan untuk memandang dan memecahkan masalah sebagai warga global, kemampuan bekerja sama secara kooperatif, tanggung jawab sosial, serta kemampuan memahami dan menghargai keberagaman budaya (UNESCO, 2015). Selain itu, peserta didik juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan empati sosial. Dengan demikian, IPS tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan sosial, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kesadaran global dan tanggung jawab kemanusiaan (Nussbaum, 2011).

Dalam konteks globalisasi dan revolusi digital, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga global yang kritis, adaptif, dan memiliki empati terhadap isu-isu kemanusiaan lintas negara. Urgensi pendidikan kewarganegaraan global (*global citizenship education*) adalah untuk mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya memahami persoalan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan tantangan global seperti ketidakadilan, perubahan iklim, kemiskinan, dan intoleransi (Usmi & Samsuri, 2022; UNESCO, 2018).

Sinergi antara pendidikan multikultural dan literasi digital dalam pembelajaran IPS juga menjadi landasan penting dalam mengembangkan kewarganegaraan kritis. Awaliyah et al. (2025) menegaskan bahwa kombinasi kedua pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat identitas kewarganegaraan global, tetapi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam dunia digital dengan cara yang etis, kritis, dan bertanggung jawab.

Pendekatan *project-based learning* (PjBL) dapat digunakan sebagai strategi efektif dalam mengimplementasikan kewarganegaraan kritis. Melalui proyek yang berfokus pada isu-isu aktual seperti pelanggaran HAM, korupsi, kemiskinan, atau kebijakan publik, peserta didik didorong untuk meneliti, menganalisis, dan mencari solusi terhadap persoalan nyata di masyarakat (Suyato et al., 2023). Model pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar secara kontekstual, kolaboratif, dan reflektif, sehingga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kepedulian sosial.

Guru IPS memiliki peran strategis dalam membangun budaya berpikir kritis melalui strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis kolaborasi. Menurut Sapriya (2017), guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis, terbuka, dan dialogis agar siswa dapat mengekspresikan pendapat secara rasional dan menghargai pandangan orang lain. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi elemen penting dalam mengembangkan kompetensi abad 21, sehingga siswa tidak hanya menjadi warga negara yang cerdas dan kritis, tetapi juga berkarakter, toleran, serta memiliki daya saing global (Partnership for 21st Century Learning, 2019).

Dengan demikian, pembelajaran IPS melalui pendekatan kewarganegaraan kritis mendorong peserta didik untuk tidak sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan aktif menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan persoalan sosial yang relevan dengan kehidupan nyata. Integrasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial menciptakan proses pembelajaran yang lebih inklusif, kontekstual, dan relevan dengan tuntutan zaman. Hal ini menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan global serta berperan sebagai warga negara yang aktif, reflektif, dan berkontribusi positif bagi masyarakatnya.

2.5 Studi Sosial Masalah Pendidikan dan Sosial

Studi sosial (social studies) merupakan bidang kajian yang berorientasi pada upaya memahami hubungan antara individu dan masyarakat dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam pendidikan, studi sosial memiliki fungsi strategis untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang sadar terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam menghadapi dinamika sosial

yang kompleks. Menurut National Council for the Social Studies (NCSS, 2010), studi sosial adalah integrasi dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik yang bertujuan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan demokratis, berpikir kritis, dan partisipasi sosial yang bermakna.

Masalah sosial dan pendidikan merupakan dua dimensi yang saling berkaitan erat dalam studi sosial. Pendidikan yang tidak merata, ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, hingga degradasi moral dan rendahnya literasi sosial merupakan isu yang perlu dianalisis secara mendalam dalam pembelajaran IPS. Tilaar (2012) menegaskan bahwa masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek akses dan mutu, tetapi juga pada relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Oleh karena itu, studi sosial berperan sebagai ruang refleksi dan aksi sosial untuk memahami bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial dan keadilan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, masalah sosial sering kali muncul akibat adanya ketimpangan struktural yang memengaruhi kesempatan individu dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Bourdieu (1990) melalui konsep *cultural capital* menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh modal budaya dan ekonomi yang dimiliki individu atau keluarga. Akibatnya, sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketidakadilan sosial melalui mekanisme seleksi yang terselubung. Pendekatan ini relevan dalam studi sosial untuk mendorong kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas ketimpangan sosial dan perlunya transformasi menuju keadilan pendidikan.

Selain itu, perubahan sosial yang cepat di era digital juga menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Munculnya disinformasi, intoleransi, serta menurunnya empati sosial di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan sosial perlu menanamkan literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam ruang maya (Fitriani & Mulyana, 2023). IPS sebagai wahana pembelajaran sosial dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial peserta didik agar mampu berinteraksi secara sehat dan produktif di dunia digital maupun nyata. Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan kerusakan lingkungan juga menjadi fokus utama dalam studi sosial. Menurut Johnson dan Johnson (2014), studi sosial yang efektif harus mengajak siswa

untuk memahami akar masalah sosial serta mencari solusi melalui pendekatan kolaboratif, empatik, dan berbasis nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya mengajarkan teori sosial, tetapi juga menumbuhkan kepekaan sosial dan tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi terhadap perubahan sosial yang positif.

Pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan proyek sosial (*project-based learning*) menjadi strategi yang tepat dalam mengkaji isu-isu pendidikan dan sosial. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat menganalisis fenomena sosial di lingkungan mereka seperti ketimpangan pendidikan, kemiskinan, atau masalah kebersihan lingkungan, kemudian merumuskan solusi nyata. Hal ini sesuai dengan pandangan Freire (1998) bahwa pendidikan harus mendorong peserta didik menjadi subjek yang berpikir kritis terhadap realitas sosial serta berani mengambil tindakan transformatif untuk memperbaikinya. Studi sosial yang menekankan analisis terhadap masalah pendidikan dan sosial pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan *social consciousness* atau kesadaran sosial peserta didik. Menurut Banks (2015), kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dengan semangat keadilan, empati, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan IPS, kajian masalah sosial dan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praksis mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang peka terhadap isu kemanusiaan dan sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, studi sosial tentang masalah pendidikan dan sosial merupakan wujud nyata dari pendidikan yang humanistik dan reflektif. Pembelajaran IPS tidak sekadar menyampaikan pengetahuan tentang masyarakat, melainkan juga membangun kemampuan berpikir kritis, etika sosial, dan kesadaran kolektif untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

STUDI KASUS

Krisis Lingkungan dan Ketimpangan Sosial di Kalimantan

Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang paling kaya sumber daya alam di Indonesia. Namun di balik kekayaan itu, wilayah ini juga menghadapi krisis lingkungan dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Pembukaan lahan besar-besaran untuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit telah mengubah bentang alam secara drastis. Hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat adat kini banyak hilang, menyebabkan banjir, kekeringan, serta penurunan kualitas udara dan tanah. Secara ekonomi, kegiatan industri ekstraktif ini memang menghasilkan devisa besar bagi negara, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal yang justru sering tergusur dan kehilangan mata pencaharian.

Dari sudut pandang sejarah, pola eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan merupakan warisan struktur ekonomi kolonial yang masih menempatkan daerah penghasil sebagai penyedia bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan bagi masyarakatnya. Sementara itu, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya partisipasi warga dalam kebijakan pembangunan menunjukkan adanya masalah dalam sistem politik dan kewarganegaraan yang belum sepenuhnya demokratis. Di sisi lain, ketimpangan pendidikan di wilayah pedalaman membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sehingga memperdalam jurang kesenjangan sosial-ekonomi. Melalui kajian IPS, kasus ini dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis, historis, ekonomi, dan politik peserta didik, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Pertanyaan Diskusi:

1. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi?
2. Mengapa kekayaan sumber daya alam di Kalimantan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal?
3. Dalam perspektif sejarah, bagaimana warisan sistem ekonomi kolonial masih berpengaruh terhadap pola eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan saat ini?
4. Mengapa penegakan hukum lingkungan di Kalimantan masih lemah, dan apa dampaknya bagi warga negara?

5. Bagaimana ketimpangan pendidikan di wilayah pedalaman Kalimantan memperparah kesenjangan sosial-ekonomi?
6. Apa peran pendidikan IPS dalam menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial pada peserta didik?

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24402-24407.
- Aliyah, S., Pranoto, R. A., Agustin, E. R., & Trisetiyoko, D. (2025). Peran Sejarah dalam Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(1), 64-74.
- Awaliyah, N., Hidayat, R., & Santoso, A. (2025). *Integrasi Literasi Digital dan Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran IPS Abad 21*. Jurnal Pendidikan Sosial, 17(1), 55–68.
- Banks, J. A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Routledge.
- Bintarto. (1997). *Geografi: Suatu pendekatan dan analisa keruangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Burt, J. E., & Muller, P. L. (1993). *Environmental geography*. New York: John Wiley & Sons.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Endayani, H. (2018). Sejarah dan Konsep Pendidikan IPS. *Ittihad*, 2(2).
- Fitriani, L., & Mulyana, R. (2023). *Literasi Digital dan Tantangan Sosial Pendidikan Abad 21 dalam Pembelajaran IPS*. Jurnal Pendidikan Sosial, 15(2), 87–98.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*. Rowman & Littlefield.

- Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2014). *Business* (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Hati, S. T. (2019). Hubungan Antara Ilmu-Ilmu Sosial dan IPS (Sumber dan Materi IPS). *Ijtimaiyah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 2(1).
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2014). *Cooperation in the Classroom*. Interaction Book Company.
- Karunia. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kinerja UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Data perkembangan UMKM Indonesia tahun 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Mulyasa, E. (2015). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, T., & Lubis, M. A. (2018). *Konsep Dasar IPS*. Samudra Biru.
- National Council for the Social Studies (NCSS). (2010). *National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for Teaching, Learning, and Assessment*. NCSS.
- Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st Century Learning*. Battelle for Kids.
- Pitriyah. (2022). Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3, 1189-1195.
- Rahmandani, R. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembelajaran IPS untuk Pengembangan Wawasan Kritis Peserta Didik*. *Jurnal Civic Education*, 7(2), 102–112.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.

- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Susanto, A. (2014). *Teori belajar & pembelajaran di sekolah dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyato, H., Wahyudi, D., & Widodo, S. (2023). *Implementasi Project-Based Learning dalam Penguatan Kewarganegaraan Kritis di Sekolah Menengah*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(4), 411–427.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Trianto. (2012). *Model pembelajaran terpadu: Konsep, strategi, dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2018). *Education for Sustainable Development and Global Citizenship*. UNESCO.
- Usmi & Samsuri. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155-164.
- Usmi, R., & Samsuri. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Global dalam Konteks Abad 21*. *Jurnal Civics*, 19(2), 165–178.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.